

Intisari

Wacana Alokasi Dana Desa atau ADD santer dibicarakan dalam kerangka RUU Desa dalam keuangan desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Wacana ADD dari APBN 10% menjadi isu terkait untuk realokasi sumber dana dan reformula kebijakan ADD dari bagian perimbangan pusat dan daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaknai mempunyai manfaat bukan hanya persoalan transfer dari perimbangan pusat dan daerah namun mendorong semangat desentralisasi dan otonomi desa sesuai kebutuhan lokal setempat. Kebijakan atau program ADD di Kabupaten Klaten diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2008 beserta Peraturan Bupati dari tahun 2010 hingga 2012. Implementasi Kebijakan ADD di Desa Kalitengah dipilih sebagai studi kasus untuk memungkinkan merepresentasikan implementasi ADD di Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ADD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dalam penelitian ini melihat implementasi ADD terhadap komunikasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kepatuhan dari tim pelaksana tingkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* berdasar tujuan karena kelompok sasaran atau *targetgroup* adalah desa, di mana banyak aktor yang berkepentingan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dengan mengutip tahapan analisis dari Miles dan Huberman (1994) yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan terakhir *conclusion drawing or verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ADD Desa Kalitengah selama tahun 2010-2012 lancar. Hal ini didukung adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dalam implementasi ADD di Desa Kalitengah. Dana ADD dalam pos kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana dimaksudkan sebagai “stimulan” sehingga pembiayaan pembangunan di dusun (wilayah RW) dibebankan pada swadaya masyarakat. penelitian ini tidak dapat mengakses banyak informasi dikarenakan pendokumentasian pelaksanaan ADD yang tidak rapi baik di tingkat RW maupun desa.

Dalam pelaksanaan ADD tahun 2010-2012 di Desa Kalitengah dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang lancar di level desa dengan RW. Dari sisi faktor ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), secara kuantitas dan kualitas meskipun masih belum memenuhi kriteria ideal, ternyata SDM mampu melaksanakan implementasi ADD. Ketua RW mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam implementasi ADD. Serta faktor kepatuhan menjadi substansi penting dalam implementasi ADD Desa Kalitengah meskipun masih bersifat administrasi dan teknis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan meningkatkan sosialisasi ADD di lapisan masyarakat, pengatur ulang RPJMDes sebagai acuan ADD, meniadakan formalitas tim pelaksana tingkat desa dalam implementasi ADD, mewajibkan pendokumentasian laporan kegiatan dari tiap-tiap dusun, serta

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD dan meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola ADD dalam hal pengadministrasian.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, implementasi, komunikasi, ketersediaan SDM, kepatuhan

Abstract

Village Fund Allocation discourse or ADD was widely discussed within the framework of the bill in the village of village finances as one of the sources of rural income. ADD discourse of the state budget 10% to issues related to the reallocation of resources and policies reformula ADD from the central and regional balance. Village Fund Allocation (ADD) is interpreted to have benefits not only the issue of the transfer of the balance of central and local, but encourage the spirit of decentralization and autonomy of local villages in accordance with local requirements. ADD policies or programs in the district of Klaten stipulated in law No. 5 of 2008 and its decree from 2010 to 2012. Implementation in the village ADD Kalitengah chosen as a case study to allow represent implementations of ADD in Klaten District. This study aims to determine the implementation of ADD as well as the factors that influence.

In this study see the implementation of ADD to communication, availability of Human Resources (HR) as well as the compliance of the village-level executive team. This research is a qualitative descriptive study. Data were extracted using purposive sampling technique by destination for the target group or targetgroup is the village, where many actors concerned. Data collection techniques with interview, observation and documentation. As well as data analysis techniques to quote the analysis stage of Miles and Hubermas (1994) is a data reduction (data reduction), a data display (presentation of data), and the final conclusion drawing or verification (drawing conclusions or verification).

The results showed that the implementation of the program ADD village during the 2010-2012 Kalitengah smoothly. This is supported by the consistency between planning and execution in the implementation of ADD in the village Kalitengah. ADD funds in the postal community development activities and construction of infrastructure facilities intended as a "stimulant" to finance development in the hamlet (RW) imposed on non-governmental. This study can not access a lot of information because of documenting the implementation of ADD are not neatly at both the RW and villages. In the implementation of ADD in 2010-2012 in the village of Kalitengah influenced by smooth communication at village level with RW.

In terms of the availability of Human Resources (HR), in quantity and quality although still not meet the ideal criteria, it turns human resources capable of carrying out the implementation of ADD. RW able to encourage community participation in the implementation of ADD. As well as compliance factors become important substances in the implementation of ADD village Kalitengah though still administrative and technical nature. Based on these results, researchers

suggest increasing the dissemination of ADD in society, the reset RPJMDes as a reference ADD, negating the formality of village-level implementation team in the implementation of ADD, requiring documentation of the activity report of each village, as well as increase public participation in the implementation of ADD and improve quality of human resources in managing ADD in terms of administration.

Keywords: Village Fund Allocation, implementation, communication, availability of human resources, compliance.